



**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Sekretariat Tim Kerja Konektivitas MP3EI

**KLIPING
BERITA MEDIA CETAK
TIM KERJA KONEKTIVITAS**

HARI KAMIS, 7 MARET 2013



DAFTAR ISI

Jalan Tol	1
Terminal Peti Kemas Semarang	2
Trans-Sumatera	3
Proyek Waskita	4
Pertamina	5
Pembangunan Smelter.....	6



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
☐ Republika
☐ Rakyat Merdeka
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia
☐ Sinar Harapan
☐ Seputar Indonesia
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo
☐ Suara Pembaruan
☐ Investor Daily
☐ Jurnal Nasional
- ☒ Bisnis Indonesia
☐ Pikiran Rakyat
☐ Kontan
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,
.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
3 Ruas Trans-Sumatera Pasti Digarap Tahun Ini	<div>- Tiga ruas yang akan digarap merupakan ruas prioritas</div> <div>- Pembebasan lahan pasti akan mengalami sedikit hambatan, tetapi dengan diserahkan seluruhnya kepada Hutama Karya diharapkan prosesnya bisa lebih cepat</div> <div>- Hak pengelolaan berada di Hutama Karya dan dia dapat bekerja sama dengan swasta dan sesama BUMN</div>					

JALAN TOL

3 Ruas Trans-Sumatra Pasti Digarap Tahun Ini

JAKARTA—Pemerintah memastikan akan mendukung sepenuhnya pembangunan jalan tol trans-Sumatra yang sudah ditugaskan kepada PT Hutama Karya.

Thomas Mola
redaksi@bisnis.co.id

Hutama Karya tidak hanya mengerjakan konstruksi tetapi, tetapi juga bertanggung jawab mengurus pembebasan lahan untuk jalan tol sepanjang 2.700 km dan pengoperasian jalan tol tersebut.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengungkapkan pemerintah memastikan tiga ruas dari keseluruhan 24 ruas jalan tol trans-Sumatra akan digarap pada tahun ini. Ruas lainnya dikerjakan secara bertahap hingga 2025. Ketika ruas itu ialah Palembang-Indralaya, Medan-Binjai dan ruas Padang-Sidincin.

"Internal rate of return (IRR)-nya tidak cukup dan diserahkan kepada Hutama Karya. Intinya jalan itu harus dibangun berapa pun kekurangannya akan didukung oleh pemerintah," ujarnya ditemui se usai rapat koordinasi yang membahas penugasan

Hutama Karya di Kantor Menko

Perekonomian, Rabu (6/3/2013). Menurut itu, pembebasan lahan pasti akan mengalami sedikit hambatan, tetapi dengan diserahkan seluruhnya kepada Hutama Karya diharapkan prosesnya lebih cepat selesai.

Tiga ruas yang akan digarap itu, menurutnya, merupakan ruas prioritas. Dia menjelaskan pihaknya sudah membuat perhitungan besaran viability gap funding (VGF) untuk semua ruas jalan tol trans-Sumatra. IRR itu, paparnya berkisar antara 7%-17%.

"VGF-nya nanti bergantung IRR dan itu beda-beda bergantung tiap ruas, ada datanya ruas ini IRR-nya 12%, ini 9%, ini 14%, tetapi saya tidak hafal," ungkapnya.

PENYERTAAN MODAL

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan penugasan Hutama

Proyek Jalan Tol Utama Trans-Sumatra

Ruas	Panjang (km)	IRR (%)	Perkiraan Investasi (Rp Triliun)
Lampung-Palembang	358	17	44
Palembang-Pekanbaru	610	13	95
Pekanbaru-Medan	548	16	64
Medan-Banda Aceh	460	9	95
Palembang-Bengkulu	303	9	63
Pekanbaru-Padang	242	11	35
Medan-Sibolga	172	7	30

Sumber: Kementerian PU

BISNIS/M. RAUSHAN

Karya sudah diatur dalam peraturan presiden (perpres) yang menjadikan Hutama Karya 100% perusahaan milik pemerintah. Ia menjelaskan usulan penyertaan modal negara (PMN) dari

Hutama Karya sebesar Rp5 triliun akan dicairkan secara bertahap.

"Hanya Hutama Karya yang dilibatkan dan dia dapat bekerja sama dengan swasta dan

sesama BUMN. Namun, hak untuk mengelolanya ada di Hutama Karya," tegasnya.

Terkait trase jalan, Hatta menjelaskan seluruh ruas itu sudah diidentifikasi Kementerian PU karena ruas itu sebelumnya direncanakan sebagai high grade highway.

Sementara Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Achmad Gani Ghazaly menjelaskan trans-Sumatra merupakan proyek pemerintah yang dikerjakan Hutama Karya. Rendahnya IRR akan ditingkatkan dengan dukungan pemerintah. Sayangnya dia belum dapat memastikan besaran VGF yang akan diberikan pemerintah.

"Semua IRR-nya rendah makanya dalam rangka penugasan pemerintah, pemerintah akan leverage," ungkap Gani.

Ditemui di tempat yang sama, Direktur Utama PT Hutama

► Ruas lainnya dikerjakan secara bertahap hingga 2025.

► Dukungan viability gap funding bergantung IRR.

► Hak pengelolaan berada di Hutama Karya.

Karya Tri Widjajanto enggan untuk berkomentar terkait penugasan perseroan menggarap jalan tol trans-Sumatra.

Adapun berdasarkan data Kementerian PU ruas tol trans Sumatra akan dibagi dalam 7 proyek utama yang di dalamnya terdiri atas 24 ruas tol. IRR untuk ketujuh ruas utama itu berkisar antara 7%-17%.





Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

☐ Jan

☐ Feb

☒ Mar

☐ Apr

☐ Mei

☐ Jun

☐ Jul

☐ Agt

☐ Sep

☐ Okt

☐ Nov

☐ Des

2013

☐ Kompas

☐ Media Indonesia

☐ Koran Tempo

☒ Bisnis Indonesia

☐ Republika

☐ Sinar Harapan

☐ Suara Pembaruan

☐ Pikiran Rakyat

☐ Rakyat Merdeka

☐ Seputar Indonesia

☐ Investor Daily

☐ Kontan

☐ Suara Karya

☐ Neraca

☐ Jurnal Nasional

☐ Indopos

☐ Lain-lain,

.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Bongkar Muat di TPKS Tersendat	<div><div>- Penghentian operasional sementara dilakkan karena terdapat permasalahan di dalam otak peralatan tersebut, atau drive nya yang menyebabkan kinerjanya lambat</div><div>- Peningkatan performance akan sangat berguna untuk menunjang aktivitas bongkar muat di TPKS ke depannya, sehingga pelayanan yang diberikan akan lebih baik lagi</div></div>			Rp. 5,6 miliar	Terminal Peti Kemas Semarang	

► PERBAIKAN CRANE

Bongkar Muat di TPKS Tersendat

SEMARANG—Proses bongkar muat di Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS), Pelabuhan Tanjung Emas, mulai Selasa (5/3) hingga 6 minggu ke depan dipastikan tersendat mengingat salah satu *container crane* (CC) nomor 03 akan dihentikan sementara operasionalnya.

General Manager Terminal Peti Kemas Semarang Sumarzen Marzuki mengatakan CC 03 di TPKS diistirahatkan atau dihentikan sementara operasionalnya mulai Selasa hingga sekitar 6 minggu ke depan.

"Penghentian operasional sementara dilakukan karena terdapat permasalahan di dalam 'otak' peralatan itu, atau *drive*-nya, yang menyebabkan kinerjanya lambat, sehingga perlu dilakukan perbaikan, tutur-nya, Rabu (6/3).

Dia mengatakan selama perbaikan, peralatan tersebut akan diistirahatkan kurang lebih 6 minggu, sehingga dipastikan proses bongkar muat bakal sedikit terkendala, karena menunggu selesainya proses perbaikan. "Para pengguna jasa baik importir maupun eksportir tidak perlu mengkhawatirkan proses bongkar muat peti kemasnya bakal terkendala karena masih ada empat CC lain yang bisa dimaksimalkan," tuturnya.

Sumarzen menuturkan perbaikan terse-

but dilakukan untuk meningkatkan kinerja CC itu, karena setelah diperbaiki dipastikan kecepatannya bakal meningkat sekitar 20% dari sebelumnya.

"Peningkatan *performance* akan sangat berguna untuk menunjang aktivitas bongkar muat di TPKS ke depannya sehingga pelayanan yang diberikan lebih baik lagi. Saat ini standarnya per *crane* mampu melakukan aktivitas bongkar muat sekitar 25 boks kontainer per jam," ujarnya.

TPKS menginvestasikan dana sekitar Rp5,6 miliar untuk perbaikan tersebut, dengan dibantu teknisi Singapura. "Investasinya cukup mahal dikarenakan komponen yang diperlukan sudah jarang ada di pasaran, dan kami menginginkan barang yang terbaik sehingga bisa diandalkan *performance*-nya."

Sementara itu, Ketua Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia (ALFI) Jateng Ari Wibowo mengaku khawatir dengan penghentian sementara operasional CC 03 tersebut bakal mengganggu aktivitas bongkar muat di TPKS.

"Kami sangat mengharapkan manajemen TPKS dapat menjaga *performance*-nya yang selama ini sudah cukup baik, meskipun ada satu *crane* yang diperbaiki," tuturnya. (k39)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (-)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☒ Kompas
☐ Republika
☐ Rakyat Merdeka
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia
☐ Sinar Harapan
☐ Seputar Indonesia
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo
☐ Suara Pembaruan
☐ Investor Daily
☐ Jurnal Nasional
- ☐ Bisnis Indonesia
☐ Pikiran Rakyat
☐ Kontan
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Trans-Sumatera 2025	<div>- Pemerintah melalui perpres menugaskan PT. Utama Karya membangun konstruksi dan mengelola operasional Tol Trans – Sumatera</div> <div>- Diharapkan dengan perpres tersebut pembangunan jalan yang selama ini lambat bisa cepat</div>				PT. Utama Karya	

Trans-Sumatera 2025

Rancangan Peraturan Presiden Diteken Pekan Depan

JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah berkomitmen menyertakan modal negara ke PT Utama Karya selaku pihak yang ditunjuk membangun konstruksi dan mengelola operasional Tol Trans-Sumatera. Langkah ini merupakan bentuk jaminan pemerintah guna mempercepat pembangunan proyek itu.

Jalan tol sepanjang 2.700 kilometer tersebut ditargetkan tuntas tahun 2025.

Demikian antara lain hal penting dari Rancangan Peraturan Presiden tentang Penugasan Pembangunan Tol Trans-Sumatera yang tahap pembahasan akhirnya digelar di Jakarta, Rabu (6/3). Pembahasan dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Hadir, antara lain, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, dan Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar.

Rancangan peraturan presiden tersebut, menurut Hatta, sudah final. Setelah dirapikan, secara

administrasi tinggal mengirimkan ke Presiden untuk ditandatangani. Menurut rencana, penandatanganan dilakukan pekan depan.

Pemerintah, melalui peraturan presiden tersebut, menugaskan PT Utama Karya membangun konstruksi dan mengelola operasional Tol Trans-Sumatera. PT Utama Karya adalah BUMN yang 100 persen sahamnya milik pemerintah.

Sebagai bentuk jaminan dan dukungan konkret, kata Hatta, pemerintah berkomitmen menyertakan modal negara ke PT Utama Karya. Total kebutuhan penyertaan modal negara belum ditetapkan, tetapi besarnya Rp

2 triliun sampai Rp 5 triliun. Nilai tersebut akan dibagi sesuai kebutuhan proyek setiap tahunnya.

"Kita harapkan dengan perpres tersebut pembangunan jalan yang selama ini lambat sekali bisa cepat," kata Hatta.

Di samping penyertaan modal negara, Hatta menambahkan, PT Utama Karya juga diberi ruang untuk menarik dana dari aksi korporasi, seperti utang dan menerbitkan obligasi.

PT Utama Karya juga diberi keleluasaan untuk bekerja sama dengan badan usaha, baik swasta maupun BUMN. Namun, prinsipnya, hak pengelolaan atas proyek tetap di tangan PT Utama Karya.

Ditanya soal pengadaan lahan, Hatta mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum telah mengidentifikasinya. Diakui, masih ada sejumlah kendala di lapangan.

"Di republik ini, pembebasan tentu saja ada masalah. Biasanya, enggak ada yang lancar, tetapi relatif jauh lebih gampang dari-

pada di Jawa," kata Hatta.

Tol Trans-Sumatera sepanjang 2.700 km terbentang dari Lampung sampai Aceh. Proyek itu terbagi dalam 22 ruas. Hatta mengharapkan proyek sudah bisa mulai tahun ini di ruas-ruas yang dirasakan padat, seperti Indralaya-Palembang, Pekanbaru-Padang, dan Pekanbaru-Binjai.

Pembiayaan

Mahendra Siregar menambahkan, pembiayaan tol akan diusahakan dari penyertaan modal negara, pinjaman, dan obligasi. Nilai proyek belum dibahas terlalu detail. Namun, yang pasti, nilai total proyek akan dijabarkan per tahun agar tampak kebutuhan pembiayaan per tahun.

Utang ataupun obligasi, kata Mahendra, akan dijamin pemerintah. "Karena ini *multiyears*, selama itu dibutuhkan, maka akan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini merupakan bentuk kepastian dari pelaksanaan proyek itu," kata Mahendra. (LAS)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

☐ Jan

☐ Feb

☒ Mar

☐ Apr

☐ Mei

☐ Jun

☐ Jul

☐ Agt

☐ Sep

☐ Okt

☐ Nov

☐ Des

2013

☐ Kompas

☐ Media Indonesia

☐ Koran Tempo

☒ Bisnis Indonesia

☐ Republika

☐ Sinar Harapan

☐ Suara Pembaruan

☐ Pikiran Rakyat

☐ Rakyat Merdeka

☐ Seputar Indonesia

☐ Investor Daily

☐ Kontan

☐ Suara Karya

☐ Neraca

☐ Jurnal Nasional

☐ Indopos

☐ Lain-lain,

.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Waskita Bidik 5 Proyek	<div><div>- perseroan terus menggencarkan bidikan ke beberapa proyek strategis</div><div>- Adapun proyek yang akan diincar pada bulan ini yakni jalan tol Cikampek-Palimanan seksi IV A dan IVB senilai Rp. 1,2 triliun, penguatan tebing Waduk Jati Gede Rp. 80 miliar, jalan kereta api dua paket di Palembang Rp. 100 miliar, pembangunan irigasi peterongan di Semarang Rp. 60 miliar, dan proyek pengerjaan jalan di Timor Leste senilai Rp. 200 miliar</div></div>				PT. Waskita Karya, Tbk	

TARGET KONTRAK

Waskita Bidik 5 Proyek

JAKARTA—PT Waskita Karya Tbk mengincar lima proyek senilai Rp1,64 triliun pada bulan ini sejalan dengan target total kontrak yang ingin diraih sepanjang tahun ini yakni Rp14 triliun.

Direktur Wilayah I Waskita Karya Desi Arryani menuturkan konstruksi di Tanah Air sedang menggeliat karena didorong banyaknya pembangunan di berbagai sektor.

"Sekarang ini kalau dilihat dari segi kepemilikan kan tidak hanya APBN yang memiliki proyek, akan tetapi ada juga BUMN, jalan tol, airport dan sebagainya," katanya, Rabu (6/3).

Oleh karena itu, perseroan terus menggencarkan bidikan ke beberapa proyek strategis. "Sesuai dengan kemampuan dan pengalaman Waskita, kami terus mengincar proyek-proyek yang diyakini bisa kami dapatkan," tambahnya.

Adapun, proyek yang diincar pada bulan ini yakni jalan tol Cikampek-Palimanan seksi IV A dan IVB senilai Rp1,2 triliun, penguatan tebing Waduk Jati Gede Rp80 miliar, jalan

kereta api dua paket di Palembang Rp100 miliar, pembangunan irigasi Peterongan di Semarang Rp60 miliar, dan proyek pengerjaan jalan di Timor Leste senilai Rp200 miliar.

BANDARA

Selain itu, seperti yang diketahui, perseroan dengan BUMN konstruksi lainnya telah memenangkan tender perluasan gedung terminal 3 ultimate Bandara Soekarno-Hatta milik PT Angkasa Pura II senilai Rp4,7 triliun. Kepemilikan saham perusahaan di proyek tersebut sebesar 38%, atau Rp1,7 triliun.

Oleh karena itu, ujar Desi, perusahaan menargetkan mendapatkan tanda tangan proyek sebanyak Rp3 triliun hingga akhir Maret menyusul banyaknya proyek yang dibidik perusahaan pada akhir kuartal I/2013.

"Keenam proyek tersebut, termasuk perluasan bandara, kami harapkan ditandatangani pada bulan ini, sehingga target Rp3 triliun kami pada akhir kuartal pertama tahun ini tercapai," tutur Desi.

Perusahaan menargetkan bisa mendapatkan total kontrak hingga Rp14 triliun sampai dengan akhir tahun ini. Adapun dari target tersebut, BUMN konstruksi itu mematok rata-rata proyek luar negeri yang diperoleh perusahaan per tahunnya senilai Rp 1 triliun.

"Kami sudah memiliki jaringan dan beberapa pekerjaan di Timur Tengah dan Timor Leste," katanya.

Kepala Cabang Timor Leste Waskita Karya Agus Prihatmono menjelaskan proyek yang akan digarap pemerintah di negara itu yakni pembangunan jalan Dili-Liquica sepanjang 60 km.

Dia menyampaikan saat ini banyak sekali proyek yang ditawarkan oleh negara bekas provinsi Indonesia tersebut, sehingga kesempatan yang ada terbuka lebar.

"Mereka itu mimpinya banyak. Ingin bangun airport internasional, mau bangun pelabuhan internasional juga. Jadi yz... memang banyak kalau kita mau masuk ke sana," jelasnya.

Namun, ujarnya, peluang tersebut tidak didukung oleh keamanan pasar konstruksi oleh pemerintah setempat karena masih kurangnya peraturan-peraturan yang dapat menjamin kontrak.

(Dimas Novita S.)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Halaman:

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☒ Kompas
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Koran Tempo
- ☐ Bisnis Indonesia
- ☐ Republika
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ Pikiran Rakyat
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Investor Daily
- ☐ Kontan
- ☐ Lain-lain,
- ☐ Suara Karya
- ☐ Neraca
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Indopos

.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Karen Optimistis Target Tercapai	<div>- Saat ini Pertamina sedang menghadapi tugas berat, yaitu memenuhi target produksi minyak siap jual (lifting) minyak bumi hingga 800.000 barrel per hari</div> <div>- Pada masa kepemimpinan Karen, produksi migas naik hingga mencapai 461.640 barrel setara minyak perhari (BOEPD) dan laba bersih Rp.25,89 triliun pada 2012 serta memberikan kontribusi setoran pada negara Rp.66,11 triliun</div>				PT. Pertamina	

PERTAMINA

Karen Optimistis Target Tercapai

JAKARTA, KOMPAS — Karen Agustianwan diputuskan tetap menjadi Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk sementara. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara telah ditandatangani dan diserahkan kepada Karen di Kementerian BUMN, Rabu (6/3).

SK Menteri BUMN ini diserahkan Deputy Menteri BUMN Bidang Industri Strategis dan Manufaktur Dwijanti Tjahjaningih. "SK-nya masih SK perpanjangan sementara. Belum diputuskan perpanjangan periode kedua," kata Dwijanti.

Masa jabatan Karen telah habis pada 5 Maret 2013. Sebelumnya, kepada wartawan, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan sedang mempertimbangkan akan memperpanjang masa jabatan Karen untuk periode kedua. Pasalnya, saat ini Pertamina sedang menghadapi tugas berat, yaitu memenuhi target produksi minyak siap jual (lifting) minyak bumi hingga 800.000 barrel per hari.

"Selain itu, kinerja Pertamina sepanjang tahun 2012 juga sangat bagus. Laba bersihnya mencapai Rp 25,89 triliun. Ini sejarah baru," kata Dahlan.

Sementara itu, Karen Agustianwan yang dikonfirmasi mengatakan, sebagai perusahaan minyak nasional, pihaknya optimistis target tersebut bisa dicapai Pertamina dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Wakil Presiden Komunikasi Korporat PT Pertamina (Persero) Ali Mundakir menyatakan, melalui surat keputusan itu, Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham memperpanjang masa jabatan Karen sebagai Direktur Utama Pertamina per 5 Maret 2013. Perpanjangan masa jabatan itu berlaku sampai diangkatnya direktur utama yang definitif.

Pada masa kepemimpinan Karen, produksi migas naik hingga mencapai 461.640 barrel setara minyak per hari (BOEPD) dan laba bersih Rp 25,89 triliun pada 2012 serta memberikan kontribusi setoran pada negara Rp 66,11 triliun.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Pertambangan dan Energi Pri Agung Rakhman-to menyatakan, perpanjangan direktur utama wewenang pemerintah sebagai pemegang saham Pertamina. (ARN/EVY/PPG)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

☐ Jan

☐ Feb

☒ Mar

☐ Apr

☐ Mei

☐ Jun

☐ Jul

☐ Agt

☐ Sep

☐ Okt

☐ Nov

☐ Des

2013

☐ Kompas

☐ Media Indonesia

☐ Koran Tempo

☒ Bisnis Indonesia

☐ Republika

☐ Sinar Harapan

☐ Suara Pembaruan

☐ Pikiran Rakyat

☐ Rakyat Merdeka

☐ Seputar Indonesia

☐ Investor Daily

☐ Kontan

☐ Suara Karya

☐ Neraca

☐ Jurnal Nasional

☐ Indopos

☐ Lain-lain,

.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Pelaku Tambang Minta Tambahan Waktu	<div>- Pembangunan smelter butuh waktu untuk memastikan pasokan dan faktor keekonomian</div> <div>- Setiap komoditas memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga pengolahan dan pemurniannya tidak bisa disamakan</div> <div>- Selama ini sektor kehutanan menjadi salah satu kendala dalam kegiatan pertambangan</div>					

► PROGRAM PENGHILIRAN

Pelaku Tambang Minta Tambahan Waktu

JAKARTA—Tenggat 5 tahun yang diberikan Undang-Undang No. 4/2009 kepada perusahaan pemegang kontrak karya (KK) untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (*smelter*) bijih mineral dianggap tidak cukup.

Lili Sunardi
redaksi@bisnis.co.id

Ketua Working Group Hukum Pertambangan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Hendra Sinadia mengatakan setidaknya dibutuhkan waktu 7 tahun untuk membangun *smelter* dari tahap awal. Ketika UU No. 4/2009 disusun, Perhapi sempat mengusulkan tenggat

► Pembangunan smelter butuh waktu untuk memastikan pasokan dan faktor keekonomian.

► Setiap komoditas memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga pengolahan dan pemurniannya tidak bisa disamakan.

► Kementerian Kehutanan agar dilibatkan dalam implementasi Inpres No. 3/2013.

selama 7 tahun bagi perusahaan KK untuk membangun *smelter*.

"Ketika pembahasan UU Minerba, Perhapi mengusulkan 7 tahun. Yang jelas tidak ada asosiasi di sektor itu yang mengusulkan 5 tahun. Namun, realitasnya implementasinya menjadi 5 tahun. Kami tidak mengetahui siapa yang mengusulkan itu," katanya di Jakarta, Rabu (6/3).

Hendra mengungkapkan waktu 5 tahun hanya cukup untuk melakukan konstruksi dan pembangunan *smelter*. Padahal, sebelum pembangunan *smelter* itu dilaksanakan, pengusaha perlu melakukan *feasibility study* dan eksplorasi yang membutuhkan waktu bertahun-tahun.

Achmad Ardianto, Ketua Umum Perhapi mengatakan pemerintah harusnya dapat menangkap secara menyeluruh mengenai waktu pembangunan *smelter*. Pasalnya, pembangunan *smelter* membutuhkan proses panjang untuk memastikan pasokan bahan baku dan keekonomian.

Menurutnya, setiap komoditas memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga pengolahan dan pemurniannya tidak bisa di-

samakan. "Ada komoditas yang dapat dibangun langsung *smelter*-nya, tapi ada juga komoditas yang membutuhkan proses panjang sebelum pembangunan *smelter* dilakukan," jelasnya.

Ardianto juga meminta pemerintah membuat perencanaan pembangunan *smelter*. Hal itu dilakukan agar upaya peningkatan nilai tambah sektor pertambangan dapat dilakukan dengan efisien dan memiliki nilai keekonomian.

PER KLASSTER

Menurutnya, perlu dibuat mekanisme pembangunan *smelter* per klaster wilayah untuk memenuhi keekonomian dan kepastian pasokan bahan baku.

"Setiap wilayah kan memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi harus dibuat per klaster. Itu juga untuk menjaga mesin *smelter* dan menjaga keekonomian," ungkapnya.

Penggabungan perusahaan untuk membuat konsorsium dalam membangun *smelter* juga tidak mudah untuk dilakukan, karena akan bersinggungan langsung dengan kepentingan bisnis para anggota konsorsium tersebut.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo sebelumnya pesimistis akan ada penambahan *smelter* yang signifikan hingga 2014. Hal itu disebabkan panjangnya proses pembangunan *smelter* hingga berproduksi mengolah dan memurnikan bijih mineral.

Berkaitan dengan implementasi Instruksi

Presiden (Inpres) No. 3/2013 terkait percepatan penghiliran mineral, Ketua Umum Perhapi juga meminta agar melibatkan Kementerian Kehutanan sebagai pemegang kuasa atas izin pemanfaatan kawasan hutan.

Menurutnya, selama ini sektor kehutanan menjadi salah satu kendala dalam kegiatan pertambangan.

"Sayangnya, Menteri Kehutanan tidak diikutkan dalam Inpres yang meminta sejumlah kementerian di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian melakukan percepatan hilirisasi mineral. Mereka [Kementerian Kehutanan] harus ikut aktif mempercepat proses hilirisasi sektor mineral."

Didi mengungkapkan Kementerian Kehutanan sebenarnya dapat mengambil peran dengan mempercepat proses pemberian izin agar memberikan kepastian hukum untuk industri pertambangan.

Pasalnya, selama ini banyak izin yang telah lengkap, tetapi belum mendapat kepastian dari Kementerian Kehutanan.

Saat ini, lanjut Didi, tinggal menunggu langkah pemerintah untuk melibatkan Kementerian Kehutanan dalam percepatan hilirisasi.

"Perhapi telah mengungkapkan pentingnya Kementerian Kehutanan dilibatkan dalam percepatan hilirisasi mineral. Sekarang, yang punya kewenangan untuk bersikap adalah pemerintah. Pemerintah harus segera merespon ini," ujarnya. ■